



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDRI NOURMAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 410817

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/162 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 405.188.000

1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP DIESEL Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA GLM II Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOTOR, YAMAHA BTD A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 41.188.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 254.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 137.051.241

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.416.239.241

III. HUTANG Rp. 76.477.299

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.339.761.942



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.